MASYARAKAT – KOTA LAYAK ANAK - PENYELENGGARAAN
2026
PERDAKOT. PASURUAN NO. 1, LD 2026/NO. 1, TLD NO. 1, HLD KOT. PASURUAN HLM. 25
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

ABSTRAK :

- Dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, selain itu meliputi asas, tujuan, penyelenggaraan Kota Layak Anak, pemenuhan hak anak, kelembagaan, peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan keluarga, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pendanaan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PERPRES No. 25 Tahun 2021; PERMENPPPA No. 12 Tahun 2022;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, asas, prinsip, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan Kota Layak Anak. Pengaturan meliputi tahapan penyelenggaraan Kota Layak Anak yang terdiri atas perencanaan, pra Kota Layak Anak, pelaksanaan, dan evaluasi; pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak; penyusunan Profil Kota Layak Anak dan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak; pemenuhan indikator dan klaster hak anak; pelaksanaan koordinasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, serta penyediaan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Selain itu, diatur mengenai partisipasi masyarakat, media massa, dunia usaha, dan anak; pendanaan; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah ini bertujuan meningkatkan sinergi dan kolaborasi Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam mewujudkan Kota Pasuruan sebagai Kota Layak Anak yang mampu menjamin terpenuhinya hak anak serta perlindungan khusus anak secara berkelanjutan.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 April 2026.
- Dalam hal-hal tertentu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- Penjelasan : 4 hlm.